

ANALISA PENGARUH TRANSFER KE DAERAH DAN TINGKAT KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

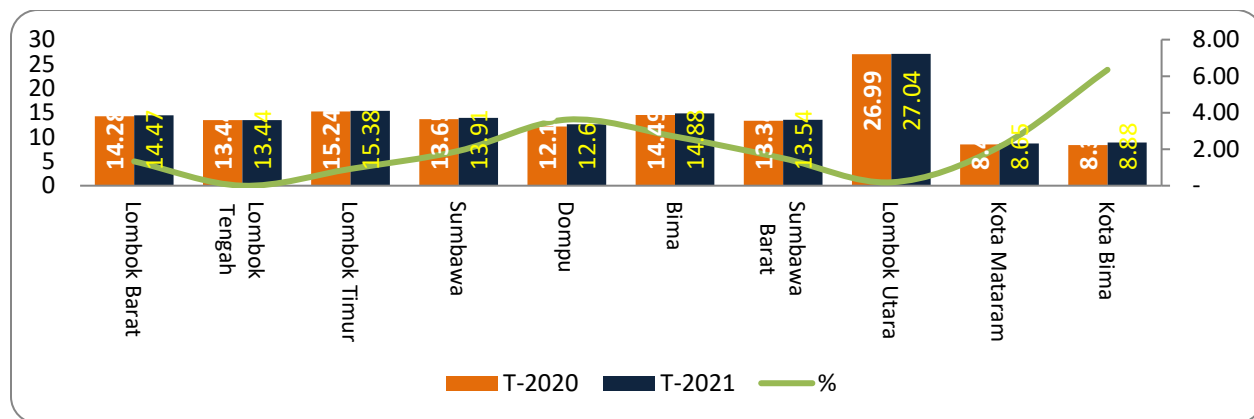
I. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan miskin, di mana miskin merupakan keadaan seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan, atau berpenghasilan sangat rendah (KBBI). Secara umum kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sikap misalkan "nrimo", pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Sementara faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan (katadata.co.id). Dalam tatanan kelembagaan pemerintah, kemiskinan menjadi tantangan bagi Pemerintah di Pusat dan Daerah, tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat. Keterbatasan lapangan kerja dan sumber daya, tingkat pendidikan rendah, kualitas kesehatan yang buruk berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan di suatu daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan pandemi Covid 19 beberapa tahun belakangan ini. Sebagai permasalahan sosial, kemiskinan dan dampaknya seperti lingkaran setan, saling mempengaruhi. Beberapa diidentifikasi sebagai dampak dari kemiskinan di masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran, munculnya permasalahan di bidang kesehatan, putus sekolah, menurunnya kualitas generasi penerus sampai munculnya berbagai kriminalitas.

Data per September 2021, jumlah penduduk miskin di NTB 735.000 atau sekitar 13,83% dari jumlah penduduk. Posisi tersebut turun 0,13 persen atau 11.400 orang dibanding posisi Maret 2021 yang mencatatkan penduduk miskin sebanyak 746.660 orang atau sekitar 14,14 persen. Data tersebut menempatkan NTB dalam 10 Provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (9,71%). Untuk kawasan Bali-Nusra, posisi NTB lebih tinggi dari NTT (20,44%), tetapi lebih rendah dari Bali (4,7%).

Data kemiskinan per Kabupaten/Kota dalam 2 tahun terakhir tidak banyak berubah. Kemiskinan terbanyak masih ada di Kabupaten Lombok Utara dan terendah di Kota Mataram dan Kota Bima. Bahkan terjadi peningkatan jumlah orang miskin di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Ditengarai hantaman pandemi covid-19 yang menyebabkan hilangnya penghasilan telah mendorong bertambahnya orang miskin khususnya yang tinggal di perkotaan. BPS mencatat, kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dari pada kemiskinan di perdesaan, dengan perbandingan 14,54 persen dan 13,12 persen.

Data Penduduk Miskin Tahun 2020-2021 (Per September)



Sumber: ntb.bps.go.id

Pandemi covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu telah Sementara untuk Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Triliunan dana APBN dialokasikan untuk membiayai berbagai program nasional pengentasan kemiskinan, baik yang bersifat mikro maupun makro. Di tataran mikro, Pemerintah menelurkan program bantuan pangan, subsidi langsung tunai, dan jaminan kesehatan sebagai upaya Pemerintah membangun *social safety net* bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sementara itu, di level makro, Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memicu stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja melalui penyediaan infrastruktur yang memadai di daerah. Salah satu cara Pemerintah untuk memfasilitasi kedua hal tersebut adalah melalui transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD). Tujuan penyaluran DAK Fisik adalah mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan masuk dalam program prioritas nasional seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan. Sementara itu, DD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya tentu saja transfer ke daerah tersebut menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah yang menuju pada perbaikan taraf hidup dan kualitas masyarakat, baik di aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kedua sasaran tersebut kemudian diukur melalui tingkat partisipasi angka kerja dan perbaikan indeks pembangunan manusia.

Sejalan dengan komitmen pemberantasan kemiskinan, Pemerintah Pusat terus berupaya meningkatkan DAK Fisik dan DD di daerah, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021, alokasi Belanja Negara untuk DAK Fisik dan DD khusus wilayah Nusa Tenggara Barat mencapai Rp 1.911,5 miliar, naik 20,87 persen dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, kenaikan DAK dan DD tersebut belum mampu memenuhi target penurunan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu 1 persen per tahun (Gubernur Nusa Tenggara Barat, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara teori bahwa DAK dan DD seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tertentu dengan realitanya di Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, *gap* ini menarik Tim Penulis untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pengaruh transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan DD dengan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Variabel Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditambahkan untuk melengkapi kedalaman analisis karena secara empirik, aktifitas fisik di daerah yang didanai dari alokasi DAK Fisik dan DD akan memicu pada keterlibatan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat setempat.

II. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan analisis ini untuk menganalisis peran fiskal khususnya belanja DAK Fisik dan Dana Desa dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan di NTB. Ruang lingkup analisis ini meliputi kebijakan alokasi dan penyaluran DAK Fisik Dana Desa di 8 Kabupaten di Provinsi NTB dengan rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

III. Landasan Teori

Kemiskinan

Menurut Supriatna dalam Kadji (2012), kemiskinan merupakan kondisi terbatas yang dialami seseorang dan terjadi tidak atas kemauannya sendiri dengan ditandai beberapa karakteristik, yaitu tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak mampu mendapat aset produksi dengan modal sendiri, tingkat pendidikan

rendah, minim fasilitas, dan berusia muda namun minim *skill* serta pendidikan. Pendapat senada dikemukakan oleh Wiguna (2013) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan terbatas yang dialami oleh seseorang sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan dan pilihan terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati orang lain serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Beberapa ahli menggunakan ukuran untuk mendefinisikan kemiskinan. Haughton & Khandker (2012) menyatakan bahwa seseorang dinyatakan miskin apabila ukuran pendapatan dan konsumsi yang dilakukan berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Badan Pusat Statistik atau BPS (2022) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dimana penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, baik itu kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita sehari sementara Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. World Bank mengukur kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah \$1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari. Miskin absolut terjadi apabila pendapatan yang diterima sehari kurang atau di bawah garis kemiskinan sementara miskin relatif terjadi karena ketimpangan distribusi pendapatan akibat kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Data Penduduk Miskin 2019-2021

Pemda	T-2019	T-2020	T-2021	Perubahan
Bima	71,950	71,320	75,490	4,170
Dompu	30,810	30,970	33,260	2,290
Lombok Barat	105,040	100,250	105,240	4,990
Lombo Tengah	128,820	128,100	131,940	3,840
Lombok Timur	193,560	183,840	190,840	7,000
Lombok Utara	63,840	59,860	61,700	1,840
Sumbawa	63,490	62,880	66,000	3,120
Sumbawa Barat	20,450	20,200	21,510	1,310
Jumlah	677,960	657,420	685,980	28,560

Sumber: ntb.bps.go.id

Secara total jumlah penduduk miskin di 8 Kabupaten area penelitian dalam kurun waktu 3 tahun befluktuasi. Sempat turun di tahun 2020 kemudian naik di tahun 2021. Terdapat kenaikan sekitar 4,34% orang miskin di tahun 2021 dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lombok Timur dan terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal peningkatan fasilitas publik.

Alokasi DAK Fisik diperuntukkan untuk bidang-bidang yang ditetapkan dalam UU mengenai APBN yang terbagi dalam 4 jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan, DAK Afirmasi, dan DAK Fisik lainnya. Sasaran DAK Reguler digunakan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik sementara DAK Afirmasi untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah dengan karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Kemudian, DAK Penugasan, sasarannya adalah mendukung tema prioritas nasional serta arahan Presiden lainnya seperti pemberantasan stunting.

Pengelolaan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.07/2021. Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan transfer dari RKUN ke RKUD melalui 3 cara, yaitu secara bertahap, langsung, dan campuran (sebagian secara bertahap dan sebagian secara langsung). Penyaluran bertahap dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan Tahap I sebesar 25% (Februari s.d Juli), Tahap II sebesar 45% (April s.d Oktober), dan Tahap III maksimal 30% (September s.d Desember). Penyaluran secara langsung dilakukan untuk bidang/subbidang dengan pagu s.d 1 miliar rupiah atau bidang/subbidang yang mendapatkan rekomendasi dari K/L teknis (untuk salur sekaligus) dengan jangka waktu April s.d Desember

Data Penyaluran DAK Fisik 2019-2021

Pemda	T-2019	T-2020	T-2021
Bima	224,014,182,519	197,686,573,668	202,764,780,561
Dompu	163,663,196,366	80,152,676,585	89,476,758,869
Lombok_Barat	299,764,178,856	156,033,738,860	143,046,223,867
Lombok_Tengah	209,448,303,935	202,197,513,657	212,705,141,575
Lombok_Timur	286,238,791,377	142,912,492,397	274,138,226,237
Lombok_Utara	242,580,862,138	91,596,364,373	104,167,244,655
Sumbawa	265,311,873,612	114,118,582,160	131,610,793,719
Sumbawa_Barat	134,501,665,966	39,521,040,299	102,773,624,068
Total	1,825,523,054,769	1,024,218,981,999	1,260,682,793,551

Sumber: omspan

Realisasi penyaluran DAK Fisik dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi. Turun di tahun 2020 kemudian naik kembali di tahun 2021. Realisasi terbesar diterima Kabupaten Lombok Timur dan terkecil Kabupaten Dompu.

Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaannya merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Tujuan penyaluran Dana Desa sendiri adalah (1) meningkatkan pelayanan publik di Desa,

(2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian Desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antarDesa.

Ditinjau dari penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan penganggulan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Konkritnya pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan swakelola melalui pemberdayaan sumber daya, baik bahan baku maupun tenaga kerja yang berasal dari desa itu sendiri. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi yang terjadi di desa tersebut yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap ekonomi setempat.

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Pembagian alokasi Dana Desa pada kabupaten/kota didasarkan pada 4 formula dengan besaran persentase, yakni (1) Alokasi Dasar (ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa (7 tingkatan)) (2) Alokasi Afirmasi (dihitung sebesar 1% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi). Alokasi Kinerja sebesar 4% dari alokasi dana desa dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Sementara untuk Alokasi Formula sebesar 30 % dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator tertentu.

Agar manfaat Dana Desa tersebut langsung bisa diterima oleh masyarakat penerima, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyaluran Dana Desa langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tanggal dan waktu yang sama (Kementerian Keuangan, 2019). Adapun penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 Tahap (desa Reguler) dan 2 Tahap untuk desa mandiri. Penyaluran kepada desa reguler dengan ketentuan Tahap I sebesar 40% (Januari s.d Juni), Tahap II sebesar 40% (Maret s.d Agustus), dan Tahap III sebesar 20% paling cepat bulan Juli. Untuk desa Mandiri penyaluran Tahap I sebesar 60% (paling cepat Januari) dan Tahap II sebesar 40% (paling cepat Maret).

Data Realisasi Penyaluran Dana Desa 2019-2021

Pemda	T-2019	T-2020	T-2021
Bima	185,618,739,000	187,393,169,000	189,614,045,000
Dompu	70,794,926,000	73,451,503,000	75,459,276,000
Lombok_Barat	155,598,022,000	160,436,939,000	162,412,374,994
Lombok_Tengah	193,175,390,000	207,840,370,000	210,862,094,000
Lombok_Timur	307,330,344,000	313,801,225,000	314,616,876,600
Lombok_Utara	64,347,204,000	71,088,014,000	80,419,235,100
Sumbawa	144,052,683,000	146,633,976,000	150,204,429,000
Sumbawa_Barat	60,412,147,000	61,955,960,000	62,372,320,000
Total	1,181,329,455,000	1,222,601,156,000	1,245,960,650,694

Sumber: OMSPAN

Realisasi penyaluran Dana Desa dari 2019 sampai dengan 2021 mengalami pertumbuhan. Realisasi tahun 2021 tumbuh 1,91% sementara jika dibandingkan dengan tahun 2019 naik tumbuh lebih tinggi (5,47%). Realisasi terbesar (tahun 2021) diterima Kabupaten Lombok Timur dan terkecil Kabupaten Sumbawa Barat.

Tingkat Partisipasi Angka Kerja

Sukirno (2004) mendefinisikan angkatan kerja sebagai jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian pada suatu masa tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Ada golongan lain yang disebut sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Menurut Simanjuntak (1985), Tingkat Partisipasi Kerja atau *Labour Force Participation Rate (LFPR)* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja pada kelompok yang sama. Semakin besar Tingkat Partisipasi Kerja maka semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga maka semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Kerja.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya Tingkat Partisipasi Kerja menurut Simanjuntak (1985), yaitu:

a. Jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Kerja. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkat penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga. Program pemerintah seperti wajib belajar sekolah dasar akan menurunkan Tingkat Partisipasi Kerja.

Selain jumlah penduduk usia sekolah di atas, Tingkat Partisipasi Kerja juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dimana semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Kerja.

b. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat maka semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja sehingga Tingkat Partisipasi Kerja semakin tinggi.

c. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja, terutama wanita dimana dengan semakin tinggi pendidikan maka kecenderungan untuk bekerja semakin besar.

Badan Pusat Statistik (2022) mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angka Kerja Indikator sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Formulasi TPAK diuraikan sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dimana:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Indeks Pembangunan Manusia

Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan, yakni: (1) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan; dan (2) sebagai alternatif untuk PDB per kapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan antar negara dan waktu. (Elizabeth, 2007).

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini pertama kali dikembangkan pada 1990 oleh ekonom Pakistan bernama Mahbub ul Haq. Formula penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = (\text{Indeks1} + \text{Indeks2} + \text{Indeks3})$$

Dimana Indeks1 = lamanya hidup, Indeks2 = tingkat pendidikan, dan Indeks3 = tingkat kehidupan yang layak.

Data Capaian IPM 8 Pemda dan NTB 2019-2021

Pemda	T-2019	T-2020	T-2021
Bima	66.37	66.30	66.66
Dompu	67.83	67.84	68.45
Lombok_Barat	68.03	68.20	68.61
Lombok_Tengah	66.36	66.43	66.72
Lombok_Timur	66.23	66.30	66.66
Lombok_Utara	64.49	64.42	64.77
Sumbawa	67.60	67.61	68.01
Sumbawa_Barat	71.52	71.63	71.85
NTB	68.14	68.25	68.65

Sumber: ntb.bps.go.id

Dalam 3 tahun terakhir IPM NTB mengalami peningkatan. Tahun 2021 naik sekitar 0,59% dari tahun 2020 dan tahun 2020 juga tumbuh sekitar 0,16% dari tahun sebelumnya. Sementara dengan 8 daerah kajian, rata-rata raihan IPM juga mengalami kenaikan. Tahun 2021 naik 0,56% dari tahun 2020, dan tahun 2020 naik 0,06% dari tahun sebelumnya. Terdapat 1 daerah dengan raihan IPM melebihi IPM NTB yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai IPM di atas 71.

IV. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memotret tingkat penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa serta tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat; (2) menganalisis pengaruh DAK Fisik dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat; (3) mengevaluasi kebijakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahun 2019 s.d. 2021 berupa realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, jumlah penduduk miskin dan

tingkat kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angka Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia pada 8 kabupaten dan 2 kota di Nusa Tenggara Barat. Data realisasi DAK Fisik dan Dana Desa diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sementara data jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angka Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Populasi penelitian adalah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampel penelitian diambil dengan metode *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu, yaitu daerah penerima dana DAK Fisik dan Dana Desa. Dari metode sampling tersebut diperoleh 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memenuhi kriteria penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel dependen tingkat kemiskinan di kabupaten/kota (Y) dan variabel independen adalah DAK Fisik (X_1), Dana Desa (X_2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_4).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi dengan data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* yang digunakan adalah 11 kab/kota di Nusa Tenggara Barat sementara data *time series* mulai tahun 2019 s.d. 2021. Model regresi panel ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

dimana:

Y = kemiskinan

α = konstanta/intercept

β = koefisien regresi

X_1 = DAK Fisik

X_2 = Dana Desa

X_3 = Tingkat Partisipasi Angka Kerja

X_4 = Indeks Pembangunan Manusia

Analisis data dilakukan dengan metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*, uji kriteria model dengan menggunakan uji *LM Breusch-Pagan*, *Uji Chow*, dan *Uji Hausman* guna menentukan kesesuaian model yang tepat. Sementara itu, uji statistik dilakukan dengan *Uji t*, *Uji F*, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan maupun secara parsial.

V. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis

Pengujian Model

1. *Uji Chow*

Hasil penelitian dengan uji *Chow* menunjukkan bahwa *p-value* atau probabilitas dari *Chi-square* dan *F test* adalah 0.0000 yang berarti pada $\alpha = 0,05$ maka $p\text{-value} < \alpha$ atau $0,0000 < 0,05$ yang berarti hasil uji menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang terpilih adalah ***Fixed Effect Model***. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	281.809966	(7,12)	0.0000
Cross-section Chi-square	122.599228	7	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/01/22 Time: 08:48

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	224562.7	243008.0	0.924096	0.3670
X1	3.05E-08	7.17E-08	0.426142	0.6748
X2	5.62E-07	6.43E-08	8.739695	0.0000
X3	-19.21580	1654.568	-0.011614	0.9909
X4	-3404.104	2441.500	-1.394268	0.1793

R-squared	0.890431	Mean dependent var	84223.33
Adjusted R-squared	0.867364	S.D. dependent var	52783.52
S.E. of regression	19223.33	Akaike info criterion	22.74869
Sum squared resid	7.02E+09	Schwarz criterion	22.99412
Log likelihood	-267.9843	Hannan-Quinn criter.	22.81380
F-statistic	38.60181	Durbin-Watson stat	0.054158
Prob(F-statistic)	0.000000		

H_0 = model mengikuti *pooled leasts square*

H_1 = mode mengikuti *fixed effect model*

2. Uji Haussman

Sementara pada uji *Haussman*, *p-value* atau probabilitas dari *Chi-square* dan *F test* adalah 0.0062 yang berarti pada $\alpha = 0,05$ maka $p\text{-value} < \alpha$ atau $0,0000 < 0,05$ yang berarti hasil uji menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang terpilih adalah **Fixed Effect Model**. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.359817	4	0.0062

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000000	0.000000	0.000000	0.0005
X2	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0002
			14269.87946	
X3	-22.004579	-435.134435	4	0.0005

	7468.96735	2575129.119		
X4	8 1568.933654	484	0.0002	

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/01/22 Time: 09:06

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-410387.9	167071.1	-2.456367	0.0302
X1	2.34E-08	8.77E-09	2.663780	0.0206
X2	-7.66E-08	1.45E-07	-0.528219	0.6070
X3	-22.00458	363.0316	-0.060613	0.9527
X4	7468.967	2565.630	2.911164	0.0131

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999338	Mean dependent var	84223.33
Adjusted R-squared	0.998730	S.D. dependent var	52783.52
S.E. of regression	1880.881	Akaike info criterion	18.22372
Sum squared resid	42452563	Schwarz criterion	18.81275
Log likelihood	-206.6847	Hannan-Quinn criter.	18.37999
F-statistic	1645.589	Durbin-Watson stat	2.827317
Prob(F-statistic)	0.000000		

H_0 = model mengikuti *random effect model*

H_1 = mode mengikuti *fixed effect model*

Berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Haussman* maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Haussman* yaitu menggunakan **Fixed Effect Model**.

Analisis Regresi

Model **Fixed Effect Model** tersebut dianalisis menggunakan regresi dengan hasil di bawah ini.

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/01/22 Time: 07:49

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-410387.9	167071.1	-2.456367	0.0302
X1	2.34E-08	8.77E-09	2.663780	0.0206
X2	-7.66E-08	1.45E-07	-0.528219	0.6070
X3	-22.00458	363.0316	-0.060613	0.9527
X4	7468.967	2565.630	2.911164	0.0131

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999338	Mean dependent var	84223.33
Adjusted R-squared	0.998730	S.D. dependent var	52783.52
S.E. of regression	1880.881	Akaike info criterion	18.22372
Sum squared resid	42452563	Schwarz criterion	18.81275
Log likelihood	-206.6847	Hannan-Quinn criter.	18.37999
F-statistic	1645.589	Durbin-Watson stat	2.827317
Prob(F-statistic)	0.000000		

Substituted Coefficients:

=====

$$Y = -410387.884899 + 2.33745969275e-08 \cdot X_1 - 7.65995138108e-08 \cdot X_2 - 22.0045794966 \cdot X_3 + 7468.96735782 \cdot X_4 + [CX=F]$$

1. Uji T

berdasarkan hasil uji t pada model *fixed effect* di atas, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, diperoleh kesimpulan bahwa variabel DAK Fisik (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sementara variabel Dana Desa (X_2) dan Tingkat Partisipasi Angka Kerja (X_3) berpengaruh negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

2. Uji F

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji F pada model *fixed effect* di atas, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, diperoleh kesimpulan bahwa variabel DAK Fisik (X_1), Dana Desa (X_2), Tingkat Partisipasi Angka Kerja (X_3), Indeks Pembangunan Manusia (X_4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

3. R-Squared

Dengan nilai *R-squared* sebesar 0.999338 dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sebesar 99,93 persen secara simultan dipengaruhi oleh variabel DAK Fisik (X_1), Dana Desa (X_2), Tingkat Partisipasi Angka Kerja (X_3), Indeks Pembangunan Manusia (X_4) sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel di luarnya.

Pembahasan

Pengaruh DAK Fisik

Selama periode 2019 s.d. 2021, alokasi DAK Fisik di NTB diperuntukkan untuk bidang-bidang yang utamanya dikelompokkan dalam 5 jenis, yaitu DAK Reguler (23,73 persen), Belanja DAK Reguler (21,93 persen), DAK Fisik Reguler (18,66 persen), Belanja DAK Penugasan (11,36 persen), DAK Penugasan 10,04 persen), dan DAK Fisik lainnya (14,27 persen). Sasaran DAK Reguler digunakan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik sementara DAK Afiriasi untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah dengan karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Kemudian, DAK Penugasan, sasarannya adalah mendukung tema prioritas nasional serta arahan Presiden lainnya seperti pemberantasan stunting.

Dari uraian proporsi di atas, secara eksplisit tergambar kebijakan Pemerintah Pusat di Nusa Tenggara Barat melalui DAK Fisik terdiri dari 2 agenda utama tanpa mengesampingkan agenda lainnya, yakni (1) pemenuhan infrastruktur dasar dan (2) pencapaian tema prioritas nasional dan pemberantasan stunting. Hal ini kemudian selaras dengan prioritas pembangunan Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang

dalam RPJMD tahun 2019 s.d. 2023, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan (Gubernur Nusa Tenggara Barat, 2019).

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa variabel DAK Fisik secara empirik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisiennya yang bernilai positif dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Arah hubungan positif antara variabel DAK Fisik dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa apabila terjadi penambahan penyaluran DAK Fisik maka akan menambah tingkat kemiskinan. Hubungan tersebut menggambarkan anomalitas karena secara teori penambahan alokasi DAK Fisik seharusnya berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, namun untuk *locus* penelitian Nusa Tenggara Barat yang terjadi sebaliknya. Terdapat beberapa konstruksi argumen yang dibangun untuk menjelaskan lebih lanjut tentang fenomena ini, antara lain:

1. kebijakan penyaluran DAK Fisik di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2019 s.d. 2021 masih difokuskan pada peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat di 3 bidang prioritas, yaitu Pendidikan (29,44 persen), Jalan (16,13 persen) dan Kesehatan (14,24 persen). Berbeda dengan penyediaan pusat-pusat ekonomi baru seperti pasar, tempat wisata, terminal, dan bandara, dampak penyediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta kesehatan terhadap kemiskinan belum dapat dinikmati dalam jangka pendek. *Outcome* pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas baru berikut fasilitas pendukungnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang berupa ketersediaan tenaga kerja terampil dan berkualitas (*high skilled labours supply*), generasi bebas stunting dengan tingkat harapan hidup yang tinggi yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan dan kesehatan berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan.
2. Ada kemungkinan alokasi DAK Fisik di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari porsi alokasi 16,13 persen DAK Fisik untuk bidang Jalan belum mampu memperlancar arus distribusi faktor-faktor produksi. Penghapusan hambatan distribusi tersebut akan berdampak pula pada distribusi pendapatan antara daerah produksi dan daerah konsumsi.

Pengaruh Dana Desa

Selama periode 2019 s.d. 2021, alokasi Dana Desa di Nusa Tenggara Barat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan penganggulan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Konkritnya pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan swakelola melalui pemberdayaan sumber daya, baik bahan baku maupun tenaga kerja yang berasal dari desa itu sendiri. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi yang terjadi di desa tersebut yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap ekonomi setempat.

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa secara empirik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat diketahui dari koefisien dalam model untuk variabel Dana Desa bernilai negatif dengan taraf signifikansi lebih dari 0,05. Arah hubungan negatif antara variabel Dana Desa dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan penyaluran Dana Desa akan menurunkan tingkat kemiskinan. Konklusi penelitian ini selaras dengan tujuan kebijakan penyaluran Dana Desa serta bukti empirik dari hasil beberapa penelitian terkait Dana Desa di beberapa wilayah di Indonesia yang menyimpulkan bahwa penyaluran tambahan Dana Desa akan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Gagasan untuk mewujudkan desa sebagai episentrum pembangunan ekonomi baru melalui Dana Desa secara empirik tergambar di Nusa Tenggara Barat. Pemanfaatan Dana Desa untuk aktifitas pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan desa, polindes, MCK, bantuan langsung tunai, BUMDes serta program pemberdayaan masyarakat, yang disusun dan disepakati oleh masyarakat desa dalam bentuk program kerja dan kegiatan di APBDes membawa manfaat bagi masyarakat desa. Dengan kata lain, kebijakan Dana Desa terbukti efektif mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angka Kerja

Secara teori, Tingkat Partisipasi Kerja atau *Labour Force Participation Rate (LFPR)* didefinisikan sebagai tingkat perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja pada kelompok yang sama. Semakin besar Tingkat Partisipasi Kerja maka semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga maka semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Kerja.

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angka Kerja secara empirik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat diketahui dari koefisien dalam model untuk variabel Tingkat Partisipasi Angka Kerja bernilai positif dengan taraf signifikansi lebih dari 0,05. Arah hubungan negatif antara variabel Tingkat Partisipasi Angka Kerja dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan Tingkat Partisipasi Angka Kerja maka tingkat kemiskinan akan menurun. Hasil pengujian tersebut selaras dengan teori tersebut di atas bahwa ketika di suatu daerah Tingkat Partisipasi Angka Kerja, yaitu jumlah angkatan kerja dibanding jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih tinggi maka akan semakin banyak tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tertentu.

Pengembangan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat pariwisata baru berimplikasi pada peningkatan jumlah investasi dan belanja pemerintah di sektor pariwisata. Beberapa proyek pemerintah maupun swasta dalam koridor pengembangan wisata seperti KEK Mandalika, Senggigi, Pulau Moyo, Teluk Bima, Gunung Rinjani dan Gunung Tambora terus dikembangkan guna mendukung kesiapan sarana dan prasarana. Keberadaan investasi swasta dan pemerintah tersebut berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja lokal selain sektor pariwisatanya sendiri yang merupakan industri padat karya. Kombinasi kedua sektor tersebut tentunya juga merambah sektor-sektor pendukung lainnya. Pada akhirnya, peningkatan angka partisipasi tenaga kerja secara aktif akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

IPM secara definisi merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia secara empirik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat diketahui dari koefisien dalam model untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia bernilai positif dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05. Arah hubungan positif antara variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa ketika terjadi penambahan Indeks Pembangunan Manusia maka akan terjadi penambahan tingkat kemiskinan. Ini

berarti bahwa pencapaian kualitas sumber daya manusia belum mampu berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tiga indeks utama yang menjadi ukuran Indeks Pembangunan Manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi problematika dan tantangan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sehingga belum berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.279737	Prob. F(4,19)	0.3128
Obs*R-squared	5.093702	Prob. Chi-Square(4)	0.2778
Scaled explained SS	2.865095	Prob. Chi-Square(4)	0.5806

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/01/22 Time: 09:41

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.72E+09	4.94E+09	-0.551253	0.5879
X1	0.001295	0.001457	0.888733	0.3853
X2	0.000401	0.001307	0.306675	0.7624
X3	46460790	33651727	1.380636	0.1834
X4	-8068874.	49656894	-0.162493	0.8726
R-squared	0.212238	Mean dependent var	2.93E+08	
Adjusted R-squared	0.046393	S.D. dependent var	4.00E+08	
S.E. of regression	3.91E+08	Akaike info criterion	42.58925	
Sum squared resid	2.90E+18	Schwarz criterion	42.83468	
Log likelihood	-506.0710	Hannan-Quinn criter.	42.65436	
F-statistic	1.279737	Durbin-Watson stat	0.503360	
Prob(F-statistic)	0.312769			

Berdasarkan tabel di atas, tingkat probabilitas pada masing-masing variabel di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas pada model ini.

2. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 03/01/22 Time: 09:42

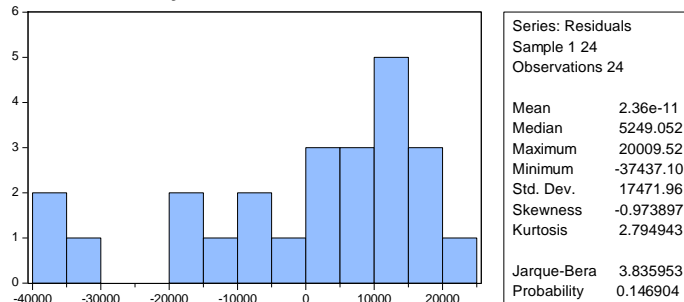
Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.91E+10	3835.264	NA
X1	5.13E-15	11.43305	1.650995
X2	4.13E-15	7.896279	1.694145
X3	2737594.	886.6250	1.260334
X4	5960922.	1762.967	1.479743

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel mempunyai nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi ini.

3. Uji Normalitas



Berdasarkan grafik di atas diperoleh nilai *jarque bera* sebesar 3,83 dan *p-value* sebesar 0,15 dimana nilai keduanya lebih tinggi dari $\alpha = 5\%$ yang artinya residual terdistribusi normal

VI. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model yang tepat untuk menggambarkan pengaruh DAK Fisik, Dana Desa, TPAK, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat adalah *Fixed Effect Model*;
2. Kebijakan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, TPAK, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat;
3. Secara parsial, pengaruh variabel DAK Fisik, Dana Desa, TPAK, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat adalah:
 - a. Penyaluran DAK Fisik dan TPAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sementara itu, penyaluran Dana Desa dan IPM berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
4. Alokasi DAK Fisik terbesar pada 2 bidang prioritas, yaitu Pendidikan dan Kesehatan belum dapat dirasakan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek sementara itu untuk bidang Jalan, terdapat potensi belum menemui sasaran untuk memperbaiki arus distribusi logistik dan jasa dari daerah penghasil ke daerah konsumsi;
5. Pemanfaatan Dana Desa untuk aktifitas pembangunan sarana dan prasarana desa yang disusun dan disepakati oleh masyarakat desa dalam bentuk program kerja dan kegiatan di APBDes membawa manfaat bagi masyarakat desa;
6. Peningkatan jumlah investasi swasta dan belanja pemerintah di sektor pariwisata serta ikutannya berimplikasi pada kenaikan jumlah partisipasi angka kerja yang pada gilirannya mendorong pengurangan angka kemiskinan;
7. Tiga indeks utama yang menjadi ukuran Indeks Pembangunan Manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi problematika dasar dan tantangan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sehingga belum dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Terhadap hasil analisis dan simpulan di atas diberikan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan reformulasi alokasi DAK Fisik pada bidang/subbidang yang fokus pada pemberantasan tingkat kemiskinan;
2. Reformulasi alokasi perlu diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku BUN Daerah untuk mempengaruhi kebijakan fiskal di daerah melalui kewenangan realokasi anggaran transfer ke daerah di wilayahnya;
3. Jumlah Dana Desa di Kabupaten perlu ditingkatkan sehingga mampu lebih berperan untuk menurunkan tingkat kemiskinan;
4. Perlu difasilitasi investasi swasta dan belanja pemerintah pada sektor dan industri yang bersifat padat karya seperti pariwisata, makanan dan minuman, perhotelan, distribusi sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap;
5. Melakukan rekonstruksi dan rejuvenasi program dan kegiatan di Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sehingga tidak ada duplikasi dan redundansi program dan kegiatan yang menyebabkan inefisiensi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022, Februari 16). *About Us: Badan Pusat Statistik*. Retrieved from BPS Website: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022, Maret 10). *About Us: Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Website: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/51>
- Elizabeth, A. S. (2007). *The Human Development Index: A History*. Global Development dan Environment Institute Tufts University.
- Gubernur Nusa Tenggara Barat. (2019). *Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023*. Mataram: Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Haughton, J., & Khandker, R. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadji, Y. (2012). *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*. Gorontalo: FEB UNG.
- Kementerian Keuangan. (2019, Desember 31). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2004). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Wiguna, R. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*.